



**Abraham Kuyper Dan Pluralitas:
Pergulatan Peran Kristiani di Tengah Keberagaman Negara Pancasila**

Samuel Tesa Katianda

Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia

Email: samuel.katianda@reformedindonesia.ac.id

ABSTRACT

Christians in Indonesia continue to struggle with their role and involvement in the public sphere, especially politics, on Indonesian soil. Abraham Kuyper is one of the Reformed theologians who is considered authoritative when it comes to the role of Christians in the public sphere. This article presents how Kuyper addresses plurality and establishes inter-religious cooperation, without compromising. This article shows that Kuyper's thinking has a wealth that corresponds to Pancasila which is the ideal foundation and basis of the Indonesian state. facilitating data collection through books that are already available, then the author describes the book's data, namely through the concept of thinking from Abraham Kuyper and Pancasila ideology, because both Kuyper's thinking and Pancasila ideology are equally able to accommodate diversity so that it can be an important input for Christian public involvement in Indonesia.

Keywords: *plurality, politics, Abraham Kuyper, Pancasila*

ABSTRAK BAHASA INDONESIA

Orang Kristen di Indonesia terus menerus menggumulkan akan peran dan keterlibatannya di ranah publik, khususnya politik, di bumi Indonesia. Abraham Kuyper adalah salah satu teolog dari kalangan Reformed yang dianggap otoritatif ketika berbicara mengenai peranan orang Kristen dalam ranah publik. Artikel ini menyajikan bagaimana Kuyper menyikapi pluralitas dan menjalin kerjasama antar umat beragama, tanpa menjadi bersifat kompromistis. Artikel ini menunjukkan bahwa pemikiran Kuyper memiliki kekayaan yang berpadanan dengan Pancasila yang adalah landasan idiil dan dasar negara Indonesia dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, penulis menggunakan metode ini untuk mempermudah pengumpulan data melalui buku yang sudah tersedia kemudian penulis memaparkan data buku tersebut yaitu melalui konsep berpikir dari Abraham Kuyper dan ideologi Pancasila, karena baik pemikiran Kuyper maupun ideologi Pancasila sama-sama mampu mengakomodasi keberagaman, sehingga dapat menjadi masukan yang penting bagi keterlibatan publik orang Kristen di Indonesia.

Kata Kunci: pluralitas, politik, Abraham Kuyper, Pancasila

Article history

Received:
24 Februari 2023

Revised:
24 Februari 2023

Accepted:
22 Maret 2023

Published:
28 Maret 2023

Citation (APA Style): Katianda, S. (2023). Abraham Kuyper Dan Pluralitas. *Jurnal Teologi & Pelayanan Kerusso*, 8(1), 30-43. <https://doi.org/10.33856/kerusso.v8i1.278>

PENDAHULUAN

Sepanjang 73 tahun Republik Indonesia berdiri, umat Kristen di Indonesia terus menggumuli peranan mereka dalam pembangunan dan perkembangan nasional. (Benyamin Fleming Intan, 2006b) Sejak era prakemerdekaan hingga pascareformasi, umat Kristen di Indonesia terus berkontribusi secara nyata sebagai warga negara yang dijamin kebebasan beragamanya di tengah Indonesia yang plural. Namun, akhir-akhir ini segala dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan-keamanan menimbulkan banyak pertanyaan bagi gereja Tuhan di Indonesia. Gereja-gereja di Indonesia seperti dipaksa untuk memberikan respons sebagai bagian dari misi gereja bagi sekitarnya. Merespons fenomena tersebut, refleksi dan diskursus tentang peranan gereja dalam ranah publik di Indonesia kembali menjamur akhir-akhir ini. (Emanuel Gerrit Singgih, 2000)

Ketika berbicara mengenai peranan orang Kristen dalam ranah publik, khususnya dalam bidang politik, salah satu tokoh dari kalangan Reformed yang cukup sering dirujuk dan dianggap figur yang otoritatif adalah Abraham Kuyper (1837-1920), seorang jurnalis, teolog, dan juga negarawan asal Belanda. (James D. Bratt & Abraham Kuyper, 2013) Kuyper menulis lebih dari dua puluh ribu artikel di surat kabar, menjadi editor di dua surat kabar, mendirikan universitas, mengajar, memimpin partai politik, bahkan melayani sebagai perdana menteri negaranya selama empat tahun (1901-1905). Salah satu pokok pikiran utama dari Abraham Kuyper adalah konsep *sphere sovereignty*, yang muncul pada pidatonya dengan judul yang sama. Dalam pidato tersebut Kuyper mengatakan pernyataannya yang termasyhur, “there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is Sovereign over all, does not cry: ‘Mine!’ (Abraham Kuyper et al., 1998a) Menurut James D. Bratt, kemungkinan signifikansi terbesar Kuyper adalah bagaimana dia menganjurkan orang percaya untuk membawa iman kepada kehidupan publik sembari menghormati hak-hak orang lain dalam komunitas plural di bawah pemerintahan konstitusional. (James D. Bratt, 2013a) Penulis yang berasal dari kalangan Reformed, melalui artikel ini bermaksud untuk membahas mengenai pemikiran Abraham Kuyper mengenai pluralitas, yang penulis lihat dapat berguna bagi keterlibatan orang Kristen di ranah publik di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.

Sepanjang 73 tahun Republik Indonesia berdiri, umat Kristen di Indonesia terus menggumuli peranan mereka dalam pembangunan dan perkembangan nasional. (Benyamin Fleming Intan, 2006a) Sejak era prakemerdekaan hingga pascareformasi, umat Kristen di Indonesia terus berkontribusi secara nyata sebagai warga negara yang dijamin kebebasan beragamanya di tengah Indonesia yang plural. Namun, akhir-akhir ini segala dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan-keamanan menimbulkan banyak pertanyaan bagi gereja Tuhan di Indonesia. Gereja-gereja di Indonesia seperti dipaksa untuk memberikan respons sebagai bagian dari misi gereja bagi sekitarnya. Merespons fenomena tersebut, refleksi dan diskursus tentang peranan gereja dalam ranah publik di Indonesia kembali menjamur akhir-akhir ini. (Andreas A. Yewangoe, 2011)

Ketika berbicara mengenai peranan orang Kristen dalam ranah publik, khususnya dalam bidang politik, salah satu tokoh dari kalangan Reformed yang cukup sering dirujuk dan dianggap figur yang otoritatif adalah Abraham Kuyper (1837-1920), seorang jurnalis, teolog, dan juga negarawan asal Belanda. (James D. Bratt, 2013c) Kuyper menulis lebih dari dua puluh ribu artikel di surat kabar, menjadi editor di dua surat kabar, mendirikan universitas, mengajar, memimpin partai politik, bahkan melayani sebagai perdana menteri negaranya selama empat tahun (1901-1905). Salah satu pokok pikiran utama dari Abraham Kuyper adalah konsep *sphere sovereignty*, yang muncul pada pidatonya dengan judul yang sama. Dalam

pidato tersebut Kuyper mengatakan pernyataannya yang termasyhur, “there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is Sovereign over all, does not cry: ‘Mine!’ (Abraham Kuyper et al., 1998b) Menurut James D. Bratt, kemungkinan signifikansi terbesar Kuyper adalah bagaimana dia menganjurkan orang percaya untuk membawa iman kepada kehidupan publik sembari menghormati hak-hak orang lain dalam komunitas plural di bawah pemerintahan konstitusional. (James D. Bratt, 2013b) Penulis yang berasal dari kalangan Reformed, melalui artikel ini bermaksud untuk membahas mengenai pemikiran Abraham Kuyper mengenai pluralitas, yang penulis lihat dapat berguna bagi keterlibatan orang Kristen di ranah publik di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.

Berkenaan keterlibatan orang Kristen dalam masyarakat yang majemuk, seperti halnya Indonesia, Darryl G. Hart berpendapat bahwa nilai-nilai keagamaan (termasuk kekristenan) tidak dapat diterapkan dalam politik dan kehidupan bernegara, terutama dalam konteks masyarakat majemuk. (Darryl G. Hart, 2006) Oleh sebab itu, menurut Hart, pendekatan yang dilakukan oleh kaum Kuyperian, yang mengajak orang percaya membawa imannya ke ranah publik, memberikan ruang yang kecil terhadap toleransi dalam konteks pluralitas sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana dengan relasi terhadap orang-orang non-Kristen. Bagi Hart, pendekatan kaum Kuyperian tidak bisa dipakai dalam kehidupan bernegara karena tidak dapat diterapkan dalam konteks dunia yang plural. Oleh karenanya Hart percaya bahwa negara haruslah menjadi negara sekuler untuk dapat mengakomodir keberagaman. (Darryl G. Hart, 2006)

Di lain pihak, dalam konteks Indonesia yang plural, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, landasan negara Indonesia, yakni Pancasila dianggap merupakan suatu landasan filosofis yang mampu menjadi pemersatu yang merangkul keberagaman suku, agama, dan golongan-golongan masyarakat. Eka Darmaputera bahkan berpendapat bahwa sejauh ini sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik—jika bukan satu-satunya—untuk menjaga persatuan Indonesia di tengah kebhinekaan. (Eka Darmaputera, 1993a) Oleh karena itu dalam memikirkan pegangan teologis bagi umat Kristen untuk berkontribusi di dunia politik di Indonesia, maka tidak bisa tidak, orang Kristen perlu memikirkan pula mengenai Pancasila. Termasuk juga dalam membawa pemikiran Abraham Kuyper ke Indonesia, adalah penting untuk melihat kompatibilitasnya dengan Pancasila yang telah teruji mampu menjaga persatuan Indonesia yang plural.

Oleh karena itu, artikel ini akan melakukan survei terhadap tulisan-tulisan Kuyper yang berkaitan dengan peran umat beragama di tengah pluralitas. Penulis akan mendemonstrasikan bahwa pemikiran Kuyper memiliki kekayaan yang berpadanan dengan Pancasila sebagai landasan idiil dan dasar negara Indonesia, karena baik pemikiran Kuyper maupun ideologi Pancasila sama-sama mampu mengakomodasi keberagaman, sehingga dapat menjadi masukan yang penting bagi keterlibatan publik orang Kristen di Indonesia. Untuk membuktikan hal tersebut, penulis pertama-tama akan menjelaskan sikap Kuyper terhadap pluralitas, juga termasuk sikapnya terhadap dunia Islam. Kemudian penulis akan menunjukkan bahwa pendekatan Kuyper terhadap pluralitas mampu mengakomodir kemajemukan, tanpa harus menjadi negara sekuler sebagaimana yang diusulkan oleh Hart. Juga penulis akan menunjukkan bagaimana berpadanan pemikiran Kuyper tersebut dengan Pancasila. Terakhir, penulis akan memberikan sebuah refleksi penulis sebagai kelompok Reformed Injili dalam menyikapi pluralitas yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen. (Sari, 2020) Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang mengharuskan melakukan observasi atau wawancara dalam perolehan data.

Pada penelitian ini objek data yang dicari oleh peneliti adalah dengan mencari literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Peneliti mencari data dalam menjawab permasalahan yang diangkat dengan membaca berbagai referensi yang sesuai. Penelitian kepustakaan merupakan penelaahan terhadap data-data pustaka yang dapat memberikan solusi atau jawaban terkait dengan masalah yang diteliti. Melalui penelitian pustaka dapat memberi hasil dari apa yang dicari melalui sumber-sumber data yang digunakan.

PEMBAHASAN

Sikap Kuyper Terhadap Pluralitas

Pertalian sejarah antara dunia barat dan kekristenan cukup jelas—bahkan terlalu jelas, sehingga di mata sebagian orang kekristenan hanyalah dimensi religius dari kebudayaan barat. Konteks Belanda di zaman Abraham Kuyper, sebagaimana dunia barat di zaman itu merupakan dunia yang cenderung homogen, berbeda dengan dinamika *landscape* religius Indonesia yang sejak semula bersifat bineka. Namun hal tersebut tidak menjadikan Kuyper dalam konteksnya terhindar dari isu dan pergumulan mengenai pluralitas agama. Dalam pemikiran politiknya, Kuyper menyadari bahwa pluralitas merupakan realitas yang tidak dapat dihindarkan.

Secara umum dalam tradisi Kuyperian, pendekatan terhadap pluralitas dibagi menjadi dua prinsip. Yang pertama adalah *structural pluralism*, yang pada prinsipnya adalah *sphere sovereignty*. Sebagaimana telah dijelaskan di Bab II, *sphere sovereignty* adalah sebuah konsep di mana dalam masyarakat ada begitu banyak *sphere* di dunia ini dengan kedaulatannya masing-masing yang mana masing-masing *sphere* bertanggung jawab langsung kepada Allah. Maka pluralitas dipandang sebagai masing-masing *sphere* yang berbeda tersebut. Prinsip yang kedua adalah *confessional pluralism*, yang salah satunya berkaitan dengan pluralitas agama. Bab ini secara khusus akan berfokus pada konsep *confessional pluralism* dari Kuyper.

Calvinisme sebagai *Life-System*

Kuyper memandang agama-agama, termasuk kekristenan, sebagai *life-system* atau *worldview*. Dengan memandang agama sebagai *worldview*, Kuyper melihat bahwa terjadi perjumpaan antara kekristenan dengan agama-agama lain di tiap-tiap aspek kehidupan, di mana tiap-tiap orang sesungguhnya membawa *worldview*-nya masing-masing di dalam kehidupan sehari-hari. Menariknya, Kuyper menyebut bahwa baginya manifestasi *Christian principle* terdapat dalam Calvinisme. Oleh karena itu, acapkali dalam tulisan-tulisannya, Kuyper mengidentikkan kekristenan dengan Calvinisme karena alasan tersebut. Bahkan Kuyper berkata, “Calvinism claims to embody the Christian idea more purely and accurately than could Romanism and Lutheranism.” Peter S. Heslam menjelaskan bahwa jika dipandang sebagai *worldview*, maka Calvinisme bukanlah gerakan teologis dan eklesiologis yang eksklusif, melainkan sebuah *worldview* yang merambah ke segala bidang kehidupan, sebagaimana *worldview-worldview* lain di dunia modern. Dengan

menempatkan Calvinisme sebagai *worldview*, menurut Heslam, Kuyper sedang membawa Calvinisme menjadi gerakan yang terlihat *up-to-date* dalam konteksnya. Oleh sebab itu, menelaah pemikiran Kuyper mengenai pluralitas, sering kali berada dalam konteks perjumpaan antara Calvinisme dengan *worldview-worldview* lainnya, termasuk paganisme, Islam, Romanisme, modernisme, dan Lutheranisme.

Perbedaan: Antitesis

Menurut Kuyper ada tiga hal yang fundamental berkenaan dengan relasi di dalam kehidupan manusia, yakni: (1) relasi manusia dengan Allah; (2) relasi manusia dengan manusia; dan (3) relasi manusia dengan dunia. Ketiga hal fundamental inilah yang menjadi pertanyaan seluruh *worldview* dunia dan selalu dimulai dengan interpretasi terhadap relasi manusia dengan Allah. Berangkat dari doktrin *election*, Kuyper melakukan pemisahan yang tegas antara orang-orang pilihan dan orang-orang yang bukan termasuk dalam umat pilihan. Pemisahan ini merupakan salah satu konsep yang penting dalam seluruh pemikiran Kuyper. Konsep ini disebut ‘antitesis.’ Kuyper menggunakan konsep antitesis untuk menunjukkan suatu situasi di mana terjadi *spiritual warfare* antara kerajaan Allah dengan setan, dan kedua kubu ini saling memperebutkan seluruh alam ciptaan. Kuyper mengatakan bahwa kekristenan sedang bergulat dengan berbagai *worldview* non-Kristen dalam suatu pertempuran yang dahsyat. Hal ini dikarenakan seluruh *worldview* di dunia selalu dimulai dengan interpretasi terhadap relasi manusia dengan Allah sehingga selalu ada *gap* antara kekristenan dengan *worldview* lainnya.

Ketika Kuyper menekankan bahwa Calvinisme adalah *worldview*, ia memang bermaksud bahwa Calvinisme sebagai *worldview* yang komprehensif dan menjadi jalan hidup. Oleh karena itu, di satu sisi agama dapat mencakup semua bidang, tetapi di saat yang bersamaan agama dapat menempatkan masyarakat dalam konflik fundamental. Agama bagi Kuyper tidak hanya sebagai satu aspek dari sekian banyak aspek dalam kehidupan. Agama adalah suatu jalan di mana umat manusia terikat bersama dalam semua aspek kehidupan di dalam kepatuhannya, entah itu kepada Allah yang sejati atau allah-allah palsu. Jadi, sebenarnya tidak ada *sphere of life* di mana agama yang sejati tidak menuntut Allah dipermuliakan. Dengan pemahaman demikian, tampaknya Kuyper berpandangan bahwa ada pemisahan yang tajam antara orang pilihan dan yang bukan. Di samping itu, juga terjadi ‘peperangan’ di antara mereka.

Common Ground: Common Grace

Pokok pemikiran Kuyper lainnya berkenaan dengan pluralitas adalah mengenai doktrin *common grace* atau anugerah umum. Doktrin Kuyper mengenai anugerah umum, adalah konsep yang seakan bertentangan dengan konsepnya mengenai antitesis. Kuyper mengatakan bahwa ada tiga emanasi dari anugerah Allah, yakni *covenant grace*, *particular grace*, dan *common grace*. *Common grace* didefinisikan oleh Kuyper sebagai, “a grace of God that you [orang Kristen] as a human being have in common with all people.” *Common grace* adalah anugerah yang disebutkan oleh Kuyper “extended to the whole of our human life.” Melalui *common grace*, Kuyper mengatakan bahwa ada suatu persamaan antara iman Kristen dengan semua *worldview* di dunia, yakni anugerah yang diberikan kepada semua manusia melalui perjanjian Allah dengan Nuh (Kej. 9:17). Kuyper berkata,

The doctrine of common grace proceeds directly from the Sovereignty of the Lord which is ever the root conviction of all Reformed thinking. If God is sovereign, then his Lordship must remain over all life and cannot be closed up within church walls or Christian circles, The extra-Christian world has not been given over to satan or to fallen humanity or to chance. God's Sovereignty is great and all-ruling also in unbaptized realms, and therefore neither Christ's work in the world nor that of God's child can be pulled back out of life. If his God works in the world, then there he must put his hand to

the plow sh that there too the Name of the Lord is glorified.

Pemikiran akan doktrin *common grace* inilah yang menjadi *common ground* antara orang percaya dengan orang dengan iman kepercayaan yang berbeda.

Paradoks

Dengan melihat pemikiran Kuyper mengenai antitesis dan *common grace*, maka pandangan Kuyper mengenai pluralitas merupakan sesuatu yang terkesan paradoks dan berkontradiksi. Karena melalui antitesis dijelaskan bahwa ada perbedaan dan pertentangan yang tegas antara umat pilihan dan yang tidak, tetapi melalui *common grace* dijelaskan bahwa ada anugerah yang sama, yang kemudian menjadi titik temu atau *common ground* antara orang Kristen dan yang bukan. Heslam mengatakan bahwa kedua konsep ini juga menyebabkan pertentangan di kalangan Kuyperian. Kelompok yang memberikan penekanan pada doktrin antitesis akan cenderung membuat perwujudan imannya melalui pendirian lembaga-lembaga Kristen yang independen dan terpisah, seperti sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, dan sebagainya. Sebaliknya, kelompok yang memberikan penekanan pada doktrin *common grace*, secara umum akan mengajarkan orang Kristen untuk berpartisipasi melalui lembaga-lembaga “sekuler” atau lembaga-lembaga sosial di masyarakat.

Integrasi: Confessional Pluralism

Doktrin antitesis dan *common grace* kemudian diintegrasikan dengan piawai oleh Kuyper melalui suatu konsep yang disebut oleh kaum Kuyperian dengan sebutan *confessional pluralism*. Menurut konsep *confessional pluralism*, dalam suatu komunitas yang *genuinely free* setiap agama dan kepercayaan harus mendapatkan kebebasan akan keberadaannya, kebebasan untuk saling berinteraksi dan juga kebebasan untuk berkontribusi dalam setiap aspek kehidupan. Kuyper mengembangkan pemahaman bahwa di ruang publik—dalam hal ini negara—fakta pluralitas tidak hanya harus diterima, tetapi juga agama-agama harus didorong untuk menghadirkan segenap keyakinan mereka untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Jadi, ketika Kuyper menginginkan umat Kristen berpartisipasi untuk memberikan dampak dan pengaruh di segala bidang dalam masyarakat, Kuyper menginginkan hal yang sama juga dilakukan oleh umat beragama lain, bahkan oleh mereka yang ateis atau mereka yang melawan kekristenan. Kuyper seakan-akan menginginkan untuk menjumpai suatu pertemuan bahkan ‘peperangan’ berbagai cara hidup dan cara pandang di ruang publik.

Confessional pluralism tampak pada pemikiran Kuyper mengenai politik yang sekalipun menyebutkan bahwa haluan politiknya berasaskan nilai-nilai kekristenan, khususnya Calvinisme, tetapi tidak menutup pintu terhadap kemungkinan hidup bersama dalam komunitas plural. Dalam *Our Program* yang merupakan manifesto politik dari *Anti Revolutionary Party* (ARP), Kuyper memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka yang non-Kristen, bahkan kepada mereka yang secara terang-terangan menentang kekristenan. Pada hakikatnya negara tidak boleh menyatakan keberpihakannya pada kelompok agama tertentu, dan juga denominasi gereja tertentu. Jadi tidak ada perlindungan khusus kelompok agama manapun, juga tidak ada tekanan dan larangan kepada kelompok agama tertentu, semua harus diperlakukan setara oleh negara. Kuyper memiliki alasan yang sangat unik untuk mendukung terjadinya pertemuan antara kekristenan dan agama-agama lain. Kuyper berkata bahwa kekristenan membutuhkan pertempuran yang konstan dengan agama-agama lain oleh karena kekristenan harus membuktikan superioritas moral dengan memenangkan pertempuran spiritual tersebut. Maka tidak heran Kuyper berkata bahwa negara harus mengizinkan orang Yahudi untuk mengajukan keberatan kepada konsep Mesias Kristen, atau orang Muslim kepada Alkitab, atau kaum evolusionis kepada konsep penciptaan. Pemerintah tidak boleh menghalang-halangi hal tersebut. Konsep seperti inilah yang

disebut *confessional pluralism*, pendekatan Kuyper mengenai pluralitas.

Tentu harus selalu disadari bahwa konteks Kuyper di Belanda yang cenderung homogen dengan kekristenan sebagai mayoritas. Namun hal ini justru memperlihatkan bahwa di dalam konteks kekristenan sebagai mayoritas pun, Kuyper menginginkan keberadaan agama lain untuk dapat hadir dalam kehidupan publik. Bahkan Kuyper mendorong partisipasi dari umat beragama lain untuk dapat bersama-sama dengan umat Kristen berperan bagi bangsa.

Jika menggunakan konsep tipologi tripolar, maka penulis menggolongkan pandangan Kuyper mengenai pluralitas dalam golongan eksklusif, karena melalui konsep antitesis, Kuyper melakukan pemisahan yang tegas antara umat pilihan dengan agama-agama lain. Namun, relasi antar umat beragama diperlukan oleh orang Kristen karena kekristenan membutuhkan ‘peperangan’ tersebut. Oleh sebab itulah, kehidupan bersama dalam komunitas plural merupakan sesuatu yang penting bagi Kuyper dan dalam komunitas plural tersebut orang percaya dianjurkan untuk membawa seluruh iman kepercayaannya di segala bidang, tidak terkecuali bidang politik.

Jadi, dalam pluralitas, Kuyper berpandangan bahwa sekalipun terjadi pemisahan yang tegas antara umat pilihan dan bukan umat pilihan, umat pilihan tetap harus berinteraksi dengan agama-agama (*worldview*) lain di arena publik sembari membawa dan mempraktikkan imannya. Oleh sebab itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara haruslah memberikan ruang sebebaskan-bebasnya bagi setiap pemeluk agama untuk memeluk agama masing-masing dan negara harus mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, tidaklah tepat jika D. G. Hart mengatakan bahwa pendekatan Kuyperian memberikan ruang yang kecil terhadap toleransi dalam konteks pluralitas karena pendekatan Kuyperian justru menginginkan interaksi yang sebesar-besarnya antara kekristenan dengan agama-agama atau *worldview*.

Sikap Kuyper terhadap Islam

Melalui *confessional pluralism*, Kuyper juga tidak menutup kemungkinan untuk dapat bekerja sama dengan agama-agama lain, salah satunya adalah dengan umat Islam. Kuyper cenderung melihat Islam secara positif karena Kuyper ingin bekerja sama dengan kaum Islam, sebagaimana dia ingin bekerja sama dengan kaum Katolik Roma untuk menghadapi modernisme dan kaum liberal yang menghantam Eropa. Keinginan Kuyper untuk bekerja sama dengan kedua pihak tersebut dapat ‘dimanfaatkan’ untuk melawan kaum liberal yang menguasai percaturan politik negeri Belanda. Dengan latar belakang demikian, pandangan Kuyper akan Islam seakan-akan memang memiliki kepentingan politis, tetapi hal tersebut adalah demi kebaikan bersama negeri Belanda, bukan untuk kepentingan politis Kuyper dan partainya semata.

Dalam beberapa kesempatan, Kuyper cenderung melihat Islam sebagai sesuatu yang positif. Kuyper mengatakan bahwa Islam adalah salah satu “*great complexes of human life.*” Kuyper mengungkapkan bahwa Islam merupakan “*the same power of conviction of life dominated by one principle*” sebagaimana yang ditemukan oleh Kuyper dalam *worldview* Roma Katolik bahkan juga Calvinisme. Kuyper memang melihat umat Islam mampu mengintegrasikan seluruh kehidupannya dalam suatu “*one Qur’anic sphere,*” sehingga umat Islam tidak melihat kehidupan sosial, religius, dan politik sebagai kehidupan yang terpisah-pisah. Bagi Kuyper hal ini merupakan sesuatu yang patut diapresiasi karena Kuyper melihat justru orang Kristen, khususnya kaum Protestan tidak mampu melakukan hal tersebut—paling tidak di ranah praktis. Berkenaan dengan kekaguman Kuyper terhadap Islam, James D. Bratt bahkan mengatakan,

Islam was the object of his (Kuyper) supreme envy—a faith that, adapting itself to every culture, steeped its adherents in the conviction that the will of God was supreme over everything from the personal to the political, from deep roots of time into the everlasting future, and under that

conviction had spread a common worldview from Gibraltar to the Philippines. This was Kuyper's dream for Calvinism.

Namun, melalui prinsip antitesis, Kuyper dengan tegas mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara kekristenan dan Islam. Bahkan Kuyper mengatakan bahwa jangan ada seorang pun yang berpikir bahwa pertentangan antara kekristenan dan Islam bukanlah hal yang prinsipil. Perbedaan tersebut antara lain berkenaan dengan doktrin Allah Tritunggal dan pengakuan Yesus Kristus sebagai Anak Allah yang tidak dipercayai oleh Muhammad dan para pengikutnya. Dalam konteksnya, Kuyper harus berhadapan gerakan Pan-Islam yang bangkit di akhir abad ke-19 dalam bentuk gerakan politik anti kolonialisme. Gerakan ini menginginkan dunia Islam dapat bersatu dalam suatu khalifah. Hal ini tentu menjadi pergumulan bagi kekristenan Eropa. Oleh karena itu, Kuyper sebenarnya menyadari bahwa terjadi 'peperangan' ideologi dan *worldview* yang terjadi antara kekristenan dan Islam di ranah politik.

Kuyper menggumulkan sikapnya terhadap Islam di masa keemasan imperialisme Belanda. Sejak abad ke-17, Belanda telah menanamkan pengaruhnya di Kepulauan Nusantara, yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Perlombaan antar imperium negara-negara Eropa yang dimulai pada awal abad ke-19 membawa imperialisme Belanda mengubah pengaruhnya akan Nusantara dari yang awalnya berfokus pada perdagangan kemudian menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayah Kerajaan Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda secara *de jure* berkuasa atas Kepulauan Nusantara sejak keruntuhan VOC pada tahun 1799. Sikap Kuyper dengan gerakan Pan-Islam yang anti kolonialisme, dan umat Islam secara umum memang mengandung muatan politis, khususnya berkenaan dengan sikap terhadap wilayah koloni. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa ketika Kuyper membuka kerjasama dengan gerakan Pan-Islam, sekalipun gerakan tersebut ingin mendirikan suatu khalifah, ada kepentingan politis yang dibawa oleh Kuyper di balik keterbukaan tersebut. Namun, kepentingan politis tersebut didasarkan kepada suatu kerinduan akan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Mengikuti pendekatan Kuyper terhadap Islam, kekristenan di Indonesia tidak perlu mengembangkan teologi yang inklusif atau bahkan pluralis yang keduanya bersifat kompromistis untuk dapat hidup bersama dengan umat Islam dan juga umat beragama lainnya. Kekristenan di Indonesia harus berani dengan tegas menyatakan iman kepada Allah Tritunggal, dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Memang posisi yang eksklusif seperti ini membuat perbedaan kekristenan dan Islam menjadi tajam dan seakan tidak mungkin didapatkan titik temu untuk dapat melakukan kerja sama. Namun sesungguhnya, sebagai warga negara Indonesia, umat Kristen dan umat Islam di Indonesia memiliki cita-cita yang sama, yakni membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Titik temu yakni cita-cita yang sama inilah yang seharusnya dikelola dalam pergumulan mengenai pluralitas. Inklusifitas yang terjadi bukan secara teologis, tetapi secara relasi.

Negara Sekular vs Negara Agama (Samuel Tesa Katianda, 2019)

Dalam konteksnya, Kuyper berhadapan dengan kaum liberal yang menginginkan Belanda menjadi negara sekuler. Bagi kaum liberal, menurut Kuyper, agama termasuk dalam wilayah kehidupan batin manusia dan dengan demikian negara sebagai kekuatan politik harus sebisa mungkin menghindari segala *contact* dengan

kehidupan batiniah tersebut. Dengan kata lain, bagi kaum liberal sekular, agama adalah masalah privat dan karenanya bersifat subyektif. Terhadap kaum liberal tersebut, Kuyper berkata,

The basic error of this political system is the claim that one cannot really know if there is a God, hence that nothing objective can be established in regard to religion, and that this whole feature of the inner life of human beings belongs to the subjective, personal, at most domestic and ecclesiastical domain(Kuyper, 2015).

Berlawanan dengan hal tersebut, Kuyper menyatakan bahwa agama bukan hanya masalah subyektif semata. Negara, bagi Kuyper, adalah “moral organization of the people as a whole,” yang berkewajiban untuk mengakui bahwa Allah itu ada dan terdapat suatu kebenaran obyektif yang harus dilakukan oleh manusia kepada Allah sebagai fondasi dari kehidupan moral. Menariknya, Kuyper melandaskan klaim ini bukan pada wahyu, melainkan pada *natural theology*. Kuyper mengatakan, “This natural knowledge of God, not the knowledge from revelation, has compelling force for every person. (Kuyper, 2015)” Dengan melandaskan klaim ini pada *natural theology*, Kuyper tidak membuat klaim ini eksklusif milik umat Kristen saja, sehingga terdapat ruang bagi pluralitas. Maka jelaslah Kuyper menolak negara sekuler. Politik sekular disebut Kuyper menolak segala ritus atau tindakan religius dalam tata negara, bahkan nama Tuhan tidak boleh disebutkan dalam lingkaran pemerintahan. Berarti juga kaum liberal sekular menolak pula pengambilan sumpah jabatan menggunakan tata agama, mereka menolak doa memohon berkat sebelum memulai segala sesuatu yang berkenaan dengan pemerintahan dan kenegaraan. Sejalan dengan Kuyper, Budi Hardiman menyatakan bahwa di dalam sekularisme yang memiliki semangat sekularisasi, ingin membangun ruang publik yang pro-pluralisme dalam sekularisme malah berbalik menjadi intoleransi terhadap alasan-alasan religius. Negara liberal sekular ingin melepaskan diri dari agama, tetapi lupa bahwa warga negara memiliki motivasinya untuk mematuhi hukum negara lewat orientasi-orientasi nilai yang juga bersumber dari nilai-nilai agama. (F. Budi Hardiman, 2018)

Terlebih dengan menimbang bahwa bagi Kuyper negara merupakan “moral organization of the people as a whole,” maka benarlah yang dikatakan Kuyper bahwa terdapat *error* yang cukup serius dalam sistem politik liberal sekular, secara ironi kaum liberal sekular justru memiliki potensi intoleransi yang serius. Dalam relasi politik dengan agama, Hardiman mengatakan bahwa terdapat dua macam jebakan, yang pertama adalah jebakan sekularisme yang ditolak oleh Kuyper. Yang kedua adalah jebakan absolutisme agama. (F. Budi Hardiman, 2018) Jika Kuyper menolak sekularisme, apakah pendekatan Kuyper yang mengatakan, “there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is Sovereign over all, does not cry: ‘Mine’,” (Kuyper, n.d.) aman dari jebakan absolutisme agama yang intoleran seperti yang dituduhkan oleh Hart?

Kuyper sekalipun menolak negara sekular, menyatakan bahwa negara bukanlah kerajaan Allah dan kerajaan Allah tidak dapat dipaksakan untuk terbatas dalam aspek kehidupan perpolitikan. Oleh sebab itu Kuyper dan partainya menolak segala upaya untuk mendirikan “negara Kristen.” Kuyper dalam hal ini menolak pandangan Richard Rother (1799-1867) yang mengatakan bahwa sejarah sejarah bertahap menggantikan kesalehan dengan moralitas dan gereja dengan negara Kristen, berakhir dalam teokrasi absolut yang universal. (Kuyper, 2015) Jadi pendekatan politik Kuyper terhindar dari kedua jebakan yang diungkapkan Hardiman, Kuyper menolak negara sekular dan juga menolak absolutisme agama dalam negara.

Maka negara yang diusulkan oleh Kuyper adalah negara yang mendasarkan negaranya pada *natural knowledge of God* dan karena itu memiliki pemerintahan yang secara aktif bekerja sebagai hamba Allah berdasarkan pengetahuan tersebut, tetapi juga secara pasif dalam lingkup *revealed knowledge of God* yang merupakan wilayah privat. (Kuyper, 2015) Dalam lingkup privat tersebut tentu negara tidak boleh melakukan intervensi apapun dan negara harus menjamin kebebasan dalam wilayah tersebut. (Kuyper, 2015) Penggunaan

natural theology merupakan suatu jalan keluar yang cemerlang oleh Kuyper sebagai suatu jalan tengah di tengah jebakan sekularisme.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila yang adalah landasan idiil negara Indonesia dimaknai sebagai *worldview* bangsa dalam kehidupan bermasyarakat. (Soerjanto Poespowardojo, 1991) Jika Kuyper menyatakan bahwa hal yang paling fundamental dalam sebuah *worldview* adalah bagaimana *worldview* tersebut melakukan interpretasi terhadap relasi dengan Tuhan, maka melalui sila pertama Pancasila, Indonesia menyatakan diri bahwa Indonesia bukanlah sebagai negara sekuler, melainkan negara yang memiliki iman dan kepercayaan terhadap Tuhan. Iman kepercayaan kepada Tuhan kemudian menjadi dasar dalam hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dengan mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti negara Indonesia meyakini adanya Tuhan yang maha Esa, pencipta alam semesta, beserta isinya, dan hal ini merupakan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Melalui keyakinan tersebut maka agama hendaknya menjadi titik konvergen dari berbagai ajaran moral, kepentingan, keyakinan, serta niat untuk membangun bangsa. Oleh sebab itu dalam segala aspek penyelenggaraan negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai agama dan ini harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. (Ngadino Surip et al., 2015)

Namun Indonesia juga bukanlah negara yang berdasarkan atas satu agama saja, melalui sila pertama Indonesia juga menolak absolutisme agama tertentu dalam kehidupan bernegara. Negara Indonesia dengan ideologi Pancasila mengambil ‘jalan tengah,’ yakni bukan negara sekular dan juga bukan agama. (F. Budi Hardiman, 2018) Bukan hanya jalan tengah, Pancasila merupakan suatu pilihan yang ‘cerdik’ untuk masyarakat yang majemuk seperti Indonesia karena prinsip-prinsipnya yang begitu umum dan begitu luas untuk merangkul hampir semua kelompok yang ada di dalam masyarakat. (Eka Darmaputera, 1993b) Jika melihat keberpadanan Pancasila dengan pendekatan Kuyperian, maka dapat dikatakan bahwa pengakuan akan Ketuhanan yang maha Esa berasal dari *natural theology*, bukan didasarkan pada ajaran agama tertentu.

Tidak hanya dalam Pancasila, prinsip pengakuan tersebut diwujudkan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...” Kalimat tersebut merupakan suatu pengakuan bahwa kemerdekaan dan berdirinya Republik Indonesia merupakan berkat dari Yang Maha Kuasa. Selain itu, dalam Pasal 29 UUD 1945 disebutkan: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Juga dalam pasal 28E disebutkan: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. UUD 1945 adalah landasan konstitusional negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaannya, maka UUD 1945 memberikan kepada rakyat Indonesia suatu konstitusional akan hidup keagamaan. Juga melalui UUD 1945, wilayah privat atau yang disebut oleh Kuyper lingkup *revealed knowledge of God* dijamin kebebasannya. Setiap warga negara di Indonesia bebas memeluk agamanya masing-masing.

Teori sekularisasi dari José Casanova mengidentifikasi ada tiga macam pengertian dari sekularisasi: (1) *secularization as religious decline*, mengklaim bahwa agama akan seterusnya mengalami kemerosotan di dunia modern sampai pada akhirnya punah; (2) *secularization as privatization*, menjaga keberadaan agama namun dimarginalkan ke lingkup privat; (3) *secularization as differentiation*, merujuk pada pembedaan fungsi dari institusi agama dengan lingkup yang lain dalam masyarakat modern, terkhusus negara, ekonomi, dan ilmu

pengetahuan. (José Casanova, 1994) *Secularization as differentiation* merupakan model yang berbeda dengan yang menjadi perhatian dari Hardiman sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Menurut Benyamin Fleming Intan, konsep “*secularization as differentiation*” dari Casanova memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan karakter dari Pancasila. Model ini disebutkan oleh Intan menghindarkan dilema dari memilih antara negara sekuler atautkah negara agama. (Intan, n.d.)

Secularization as differentiation dari Casanova selain berpadanan dengan Pancasila seperti yang disebutkan oleh Intan, menurut pandangan penulis juga berpadanan dengan konsep *sphere sovereignty* dari Kuyper, yang mana dilakukan pembedaan institusi agama dengan wilayah-wilayah lain. Sejalan dengan penulis, Bartholomew juga melihat bahwa ada paralel antara pemikiran Casanova dan Kuyper berkaitan dengan hal ini. (Bartholomew, n.d.)

Dengan membandingkan pandangan Kuyper dan Pancasila mengenai negara sekuler dan juga melalui teori sekularisasi dari Casanova, tampak ada suatu keberpadanan yang unik antara teologi politik dari Kuyper dan Pancasila berkenaan dengan negara sekuler. Teologi politik Kuyper dan Pancasila tidak menginginkan suatu negara sekuler, melainkan menginginkan suatu negara yang berdasarkan pada keyakinan pada Ketuhanan yang maha Esa dan sepatutnyalah pemerintah menjalankan negara berdasarkan keyakinan tersebut. Teologi politik Kuyper dan Pancasila juga tidak menginginkan suatu negara yang didirikan atas suatu asas agama tertentu saja, keyakinan akan Tuhan dipandang sebagai suatu bagian *natural* dari diri manusia, bukan karena ajaran agama tertentu. Oleh karena keberpadanannya, maka penerapan usulan-usulan Kuyper dalam teologi politiknya dapat diterapkan melalui penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melihat bagaimana pemikiran Kuyper mengenai negara sekuler dan keberpadanannya dengan Pancasila, maka pendapat Hart bahwa nilai-nilai keagamaan tidak dapat diterapkan dalam politik dan kehidupan bernegara tidaklah tepat. Pendapat Hart yang percaya bahwa negara haruslah menjadi negara sekuler untuk dapat mengakomodir keberagaman justru berbahaya bagi keberagaman itu sendiri. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa pendekatan liberal sekular yang ingin membangun ruang publik yang pro-pluralisme secara ironis dapat berbalik menjadi intoleransi terhadap religiusitas.

Teologi Reformed Injili dan Pluralitas

Menurut penulis, secara prinsip pendekatan Kuyper terhadap pluralitas sejalan dengan *spirit* Teologi Reformed Injili yang berpegang pada keyakinan *cooperation without compromise*. Teologi Reformed Injili percaya bahwa mempertahankan iman kristiani yang ortodoks, seperti yang digariskan oleh para rasul, tidak seharusnya menutup kemungkinan bagi mereka untuk menjadi berkat di tengah dunia yang gelap ini. Kaum Injili, sebagaimana yang diungkapkan oleh Yakub B. Susabda, tidak pernah segan-segan untuk bekerja sama dengan semua golongan dari latar belakang doktrin bahkan latar belakang iman yang berbeda. (Yakub Susabda, 2016)

Cooperation without compromise di ranah publik yang plural dapat terjadi jika orang Kristen dapat membedakan dengan jelas antara *natural knowledge of God* dan *revealed knowledge of God*. *Natural knowledge of God* sendiri merupakan respons manusia terhadap wahyu umum dari Allah yang diberikan kepada semua orang, sehingga "seharusnya" semua agama memiliki *natural knowledge of God* yang sama, dan inilah yang menjadi landasan *cooperation* tersebut. Lain halnya dengan *revealed knowledge of God* yang merupakan respons manusia terhadap wahyu khusus, atau dapat pula disebut ada di wilayah iman kepercayaan seseorang, yang mana tentu tidak boleh terjadi kompromi.

Pembedaan ini pula yang seharusnya perlu menjadi pegangan orang percaya dalam berkampanye di ranah publik yang plural. Orang Kristen tentu perlu membawa seluruh apa yang ia percaya, baik itu yang *natural* ataupun *revealed knowledge of God*, ke ranah publik, tetapi disaat yang sama perlu membedakan mana yang bersifat umum atau publik, dan mana yang bersifat khusus atau privat. Seorang Kristen yang terjun di ranah publik dan mengusahakan kebaikan-kebaikan umum bagi masyarakat umum, sebaiknya bertindak, termasuk juga berkata-kata, dengan landasan teologis yang umum pula, yaitu *natural knowledge of God*. Hal-hal yang bersifat khusus (*revealed knowledge of God*), biarlah ada di ranah yang khusus pula, atau wilayah privat. Maka dalam wilayah umum, secara fenomena, seorang Kristen berlaku dan berkata-kata sebagai makhluk Tuhan dan mengupayakan hal-hal yang baik untuk kebaikan bersama. Dan di wilayah khusus, seorang Kristen barulah berlaku dan berkata-kata dengan landasan Kitab Suci dan pengenalan akan Kristus. Sekalipun, tentu yang menjadi nilai tambah daripada peranan orang Kristen adalah pengenalannya akan wahyu khusus ketika ia terjun dan berperan di ranah publik.

Dengan tepat membedakan kedua hal inilah, *cooperation without compromise* sebagaimana yang ada dalam spirit kaum Reformed Injili dapat tercapai. Sebagaimana sikap Kuyper terhadap pluralitas, dan juga Islam, orang Kristen dengan semua umat beragama lain tentu memiliki cita-cita bersama sebagai makhluk Tuhan. Sebagai makhluk Tuhan, semua agama seharusnya memiliki kepedulian yang sama akan hal-hal seperti kemanusiaan, keadilan, dan juga keberadaban. Untuk hal-hal seperti ini, seharusnya tidak ada yang dapat menghalangi kerjasama dapat terjalin. Hal tersebut dimungkinkan karena semua agama memiliki *natural knowledge of God* sebagai respons dari wahyu dan anugerah umum.

KESIMPULAN

Melalui pemikirannya mengenai antitesis dan *common grace*, pandangan Kuyper mengenai pluralitas merupakan suatu pandangan di mana sekalipun terjadi pemisahan yang tegas antara umat pilihan dan bukan umat pilihan, umat pilihan tetap perlu, bahkan harus berinteraksi dengan agama-agama (*worldview*) lain di arena publik sembari membawa dan mempraktekan imannya. Oleh sebab itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara haruslah memberikan ruang sebebas-bebasnya bagi setiap pemeluk agama untuk memeluk agamanya masing-masing dan negara harus mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Tidak hanya hidup bersama, pendekatan Kuyperian juga terbuka akan kerja sama dengan umat beragama lain untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan bagi kebaikan bersama. Kerja sama itu diperlihatkan oleh Kuyper salah satunya dengan Islam yang bersama dengan Kuyper menentang liberalisme. Kerja sama dengan Islam tidak membuat Kuyper berkompromi akan perbedaan pandangan yang prinsipil yang memang ada dan nyata dengan Islam. Prinsip ini kompatibel dengan pandangan Reformed Injili yakni *cooperation without compromise*.

Tidak hanya dengan pandangan Reformed Injili. Dalam prakteknya dalam kehidupan bernegara, Kuyper dan Pancasila juga tidak menginginkan suatu negara sekuler, melainkan menginginkan suatu negara yang berdasarkan pada keyakinan pada Ketuhanan yang maha Esa dan sepatutnyalah pemerintah menjalankan negara berdasarkan keyakinan tersebut. Teologi politik Kuyper dan Pancasila juga tidak menginginkan suatu negara yang didirikan atas suatu asas agama tertentu saja, keyakinan akan Tuhan dipandang sebagai suatu bagian *natural* dari diri manusia, bukan karena ajaran agama tertentu.

REFERENSI

- Abraham Kuyper, Sphere Sovereignty, & James D. Bratt. (1998a). *Abraham Kuyper: A Centennial Reader*. Eerdmans.
- Abraham Kuyper, Sphere Sovereignty, & James D. Bratt. (1998b). *Abraham Kuyper: A Centennial Reader*. Eerdmans.
- Andreas A. Yewangoe. (2011). *Iman, Agama dan Masyarakat dalam Negara Pancasila*. BPK Gunung Mulia.
- Bartholomew. (n.d.). *Contours of the Kuyperian Tradition*.
- Benyamin Fleming Intan. (2006a). *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis*. Peter Lang.
- Benyamin Fleming Intan. (2006b). *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis*. Peter Lang.
- Darryl G. Hart. (2006). *A Secular Faith: Why Christianity Favors the Separation of Church and State*. I.R. Dee.
- Eka Darmaputera. (1993a). *Pancasila: Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya*. BPK Gunung Mulia.
- Eka Darmaputera. (1993b). *Pancasila: Identitas dan Modernitas*. BPK Gunung Mulia.
- Emanuel Gerrit Singgih. (2000). *Iman & Politik Dalam Era Reformasi di Indonesia*. BPK Gunung Mulia.
- F. Budi Hardiman. (2018). *Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari “Bangsa Setan-setan”, Radikalisme Agama, sampai Post-Sekularisme*. Kanisius.
- Intan. (n.d.). *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia*.
- James D. Bratt. (2013a). *Abraham Kuyper: Modern Calvinist, Christian Democrat, Library of Religious Biography*. Eerdmans.
- James D. Bratt. (2013b). *Abraham Kuyper: Modern Calvinist, Christian Democrat, Library of Religious Biography*. Eerdmans.
- James D. Bratt. (2013c). *Abraham Kuyper: Modern Calvinist, Christian Democrat, Library of Religious Biography*. Eerdmans.
- James D. Bratt, & Abraham Kuyper. (2013). *Modern Calvinist, Christian Democrat, Library of Religious Biography*. Eerdmans.
- José Casanova. (1994). *Public Religions in the Modern World*. The University of Chicago Press.
- Kuyper. (n.d.). *Kuyper, “Sphere Sovereignty*.
- Kuyper. (2015). *Kuyper, Our Program*, 58.
- Ngadino Surip, Syahril Syarbaini, & A. Rahman HI. (2015). *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Penerbit ANDI.
- Samuel Tesa Katianda. (2019). “Teologi Politik Abraham Kuyper dalam Menghadapi Politisasi Agama pada Era Pascakebenaran di Indonesia,”. *Jurnal Teologi Reformed Indonesia*, 9(2), 115–127.
- Soerjanto Poespowardojo. (1991). *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosial-Budaya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Yakub Susabda. (2016). *Teologi Reformed Injili,” dalam Membarui Selalu: Pergumulan Identitas, Dinamika,*

